



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIT KERJA** : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  
**SUB UNIT KERJA** : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUNARDI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR II
3. NHK : 225411

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	410.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m <sup>2</sup> /21 m <sup>2</sup> di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m <sup>2</sup> /21 m <sup>2</sup> di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
3. Tanah Seluas 2196 m <sup>2</sup> di SUKOHARJO, WARISAN Rp. 140.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	148.050.000
1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.050.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA LEXY B3F-I A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
4. MOTOR, HONDA F1CO2N28LO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	364.953.154
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>948.003.154</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>37.499.311</b>

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

910.503.843

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpni.kpk.go.id](http://elhkpni.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpni.kpk.go.id](http://elhkpni.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.